

KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (KKG) DAN TANTANGAN GLOBAL

Ni Luh Arjani

ABSTRACT

The Gender Equality and Justice is the problem that has been discussed globally since hundred years ago in order to reduce the gender inequality and injustice among people. The commitment to reduce the gender inequality valid for all aspects of human life including education, economy, politic, social, and culture. The importance of the discussion even become one from eight point of the international commitment through The Millennium Development Goals (MDGs) which is promote by United Nation (UN).

The emerge of attention in gender issue is being in accordance with the shift of development paradigm from the security and stability (security) approach into the welfare and equality (prosperity) approach or from the production into the humanity approach in more democratic and open atmosphere.

The strong relation to the construction of social and culture that rooted in society border the achievement of gender equality and justice. But with the strong struggle and continuous effort the gender ideology that tends to bring the detriment to one gender will be eliminated successfully. As the conclusion, if the motivation occurs among the people, it shows that our society is able to fulfill one of the agreements of Millennium Development Goals (MDGs) which is also become the international commitment.

Keywords : Equality and Justice, Gender, MDGs

Perkembangan Permasalahan Gender

Permasalahan gender di masyarakat sudah ada sejak manusia itu mulai muncul dimuka bumi ini. Namun pada awalnya ketika ilmu pengetahuan dan teknologi belum maju seperti saat ini, isu gender belum mendapat perhatian dan tidak dipermasalahkan baik oleh masyarakat secara umum maupun oleh kaum feminis. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai budaya yang berkembang terkait dengan peran atau pembagian kerja, tanggung jawab serta citra baku laki-laki dan perempuan pada saat itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan sah-sah saja. Seiring dengan perkembangan jaman yang diikuti oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, perhatian masyarakat terutama kaum feminis terhadap fenomena sosial yang terkait dengan isu gender mulai menjadi fokus perhatian.

Perhatian terhadap permasalahan gender mulai muncul sekitar tahun 40-an yang digagas oleh kaum feminis di Barat. Munculnya perhatian terhadap isu gender dan pemberdayaan perempuan diawali oleh adanya kesadaran bahwa ternyata nasib kaum perempuan di masyarakat tidak sebaik nasib lawan jenisnya. Oleh karena itu, gerakan untuk memperbaiki nasib perempuan mulai muncul yang dipelopori oleh tokoh feminis Mary Wollstonecraft dan John Stuart Mill (Amal, 1992). Dalam perkembangan berikutnya diikuti oleh tokoh-tokoh feminis lainnya yang mempunyai visi dan misi sejenis yakni mewujudkan kesetaraan

dan keadilan gender dengan memperjuangkan nasib kaum perempuan yang dianggapnya berada dalam posisi teropresi, ter subordinasi, termarginalisasi, dan terdiskriminasi. Gerakan feminis ini pada awalnya berkembang di Negara Barat seperti di Inggris, Perancis, Amerika dan lain-lain, dan dalam perkembangannya gerakan ini berkembang dalam tiga gelombang besar yakni feminisme gelombang pertama, kedua dan ketiga.

Feminisme gelombang pertama berkaitan dengan terjadinya Revolusi Perancis (1789) dimana pada saat ini berkembang beberapa paham feminis seperti; feminis Liberal, feminisme Radikal dan feminisme Marxis/ Sosialis. Dalam memahami keteropresian perempuan, masing-masing feminis ini mempunyai pandangan yang berbeda. Feminisme Liberal memandang bahwa keterbelakangan perempuan disebabkan karena adanya tradisi dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai makhluk yang ter subordinasi bukan karena kondisi alamiah yang dimilikinya. Sementara itu, feminisme Radikal memandang ketertindasan perempuan karena seksualitas dan sistem gender yang akhirnya memunculkan sistem patriarkhi, sedangkan feminisme Marxis memandang keteropresian perempuan disebabkan karena struktur sosial, ekonomi dan politik yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme (Arivia, 2005).

Feminisme gelombang kedua dikembangkan oleh

Simone de Beauvoir yang gerakannya dikenal dengan feminisme Eksistensialis. Faham ini melihat persoalan penindasan perempuan dimulai dengan adanya beban reproduksi di tubuh perempuan. Menurutnya beban reproduksi yang ditanggung perempuan dan tanggung jawab membesarkan anak membuat perempuan mempunyai posisi tawar yang lemah terhadap laki-laki. Sementara feminisme gelombang ketiga dikenal dengan feminisme Postmoderen, feminisme Multikultural dan Ekofeminisme. Pada dasarnya semua paham feminisme ini bertujuan untuk melihat dasar keterbelakangan perempuan yang kemudian ingin memperbaiki atau mencari solusi sehingga nasib perempuan menjadi lebih berdaya. Demikian juga di Indonesia, perjuangan untuk memperbaiki nasib perempuan sudah muncul sejak jaman penjajahan Belanda yang dipelopori oleh R.A Kartini yang gerakannya dikenal dengan sebutan "emansipasi". Gerakan ini pada prinsipnya juga merupakan gerakan untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan Indonesia yang pada saat itu eksistensinya sangat terpasung oleh budaya patriarki sehingga perempuan tidak memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan dan lain-lain.

Meskipun gerakan untuk memperbaiki nasib perempuan sudah berlangsung sejak lama, namun sampai saat ini ketimpangan gender di berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti dalam hal pendidikan, ekonomi, politik, sosial dan budaya masih cukup menonjol. Oleh karena itu untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat seperti yang sudah dicanangkan melalui komitmen Millenium Development Goals (MDGs), maka perlu dilakukan berbagai upaya penanganan yang serius.

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Tantangan Global

Dewasa ini permasalahan gender sudah menjadi isu global yang sangat menarik perhatian dunia. Munculnya perhatian terhadap isu gender ini sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan (security) menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan (prosperity) atau dari pendekatan produksi ke pendekatan kemanusiaan dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka. Terjadinya perubahan paradigma pembangunan seperti ini, menjadi dasar untuk mengatasi persoalan ketidakadilan gender yang masih terjadi di masyarakat menuju terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan gender (KKG).

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) adalah suatu bentukan kata yang mengandung dua konsep, yaitu kesetaraan gender dan keadilan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan

hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan (Angka 1.3 dan 4 Lampiran Inpres No.9 Tahun 2000). Agar proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki terwujud, diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan berbagai hal yang secara sosial dan menurut sejarah telah menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari peran yang dimainkannya.

Dalam mengatasi persoalan gender, telah dilakukan berbagai upaya baik di tingkat internasional, nasional maupun regional. Di tingkat internasional pada tahun 1950 dan 1960-an telah di deklarasikan suatu resolusi melalui badan ekonomi sosial PBB (ECOSOC) dan diakomodasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1968 melalui pembentukan Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI). Selanjutnya, pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan deklarasi tersebut. Oleh karena deklarasi tersebut sifatnya tidak mengikat, maka komisi PBB tentang Kedudukan Wanita kemudian menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Pada tahun 1975 di Mexico City, PBB menyelenggarakan Konferensi Wanita Internasional yang menghasilkan antara lain deklarasi persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal: pendidikan dan pekerjaan. Tiga tahun kemudian yakni tahun 1978 pemerintah Indonesia menindaklanjutinya dengan membentuk Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (Men.UPW). Melalui lembaga negara ini Pemerintah Indonesia melaksanakan aksi penanggulangan permasalahan perempuan dan gender yang terjadi di masyarakat.

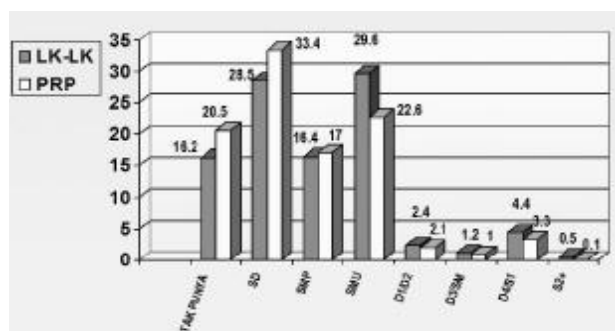
Pada tanggal 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB telah menyetujui konvensi tersebut. Karena ketentuan konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah RI dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani konvensi tersebut. Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 18 Desember 1979 pada waktu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara atas resolusi yang kemudian

menyetujui konvensi tersebut. Dalam pemungutan suara itu Indonesia menyatakan setuju sebagai perwujudan untuk ikut berpartisipasi dalam usaha menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita karena isi konvensi itu sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya konvensi ini ditetapkan dalam bentuk undang-undang yakni Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Berbagai pendekatan pembangunan terkait dengan penanganan masalah gender dan pemberdayaan perempuan pun dilaksanakan oleh pemerintah mulai dari pendekatan Women in Development (WID), dilanjutkan dengan pendekatan Women and Development (WAD). Kedua pendekatan ini ternyata belum mampu mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sehingga pemerintah melaksanakan pendekatan baru yakni Gender and Development (GAD).

Setelah perjalanan hampir setengah abad, nampaknya upaya dunia termasuk Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) belum membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini terbukti dengan masih terjadinya ketimpangan gender diberbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, politik dan ketenagakerjaan. Di bidang pendidikan misalnya, ketimpangan gender nampak pada beberapa indikator seperti angka buta huruf, dimana menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2006 jumlah perempuan yang buta huruf dua kali lipat lebih besar dibandingkan angka buta huruf laki-laki (10,3% : 4,8%). Sementara itu pada tahun yang sama (2006) data angka partisipasi sekolah (APS) laki-laki dan perempuan terutama pada jenjang pendidikan SMP dan SMA. Persentase APS perempuan di SMP 84,04% sedangkan APS laki-laki 89,68%, untuk jenjang pendidikan SMA perbandingan APS laki-laki dan perempuan 66,00% : 60,05%. Data pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk juga menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil persentase perempuan yang tamat. Tahun 2006 penduduk perempuan usia 10 tahun keatas 33, 35% yang hanya tamat SD dan laki-laki 28,52%. Secara lengkap Grafik 1 berikut ini menggambarkan komposisi pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk laki-laki dan perempuan di Bali tahun 2006.

Grafik: 1. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Provinsi Bali Usia 10 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2006.

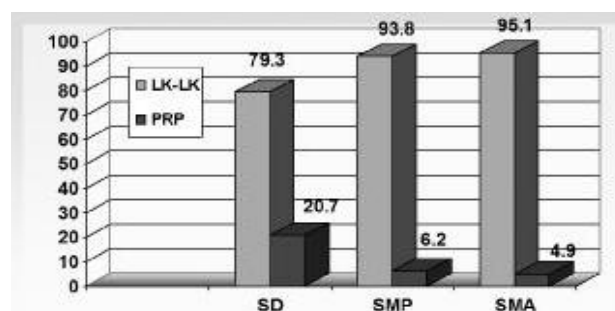


Sumber: BPS. Statistik Pendidikan, 2006.

Dari data pada Grafik 1 nampak bahwa selama ini akses anak perempuan terhadap pendidikan terutama ke jenjang pendidikan SMA ke atas masih lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Udayana (Arjani, dkk; 2005) keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor seperti: faktor geografis, ekonomi, dan faktor budaya. Faktor budaya antara lain masih adanya pandangan orang tua yang menganggap pendidikan bagi anak perempuan tidak penting karena anak perempuan nantinya akan menjadi milik orang lain dan hanya akan menjadi ibu rumah tangga dengan tugas utama di ranah domestik. Peran domestik selama ini dianggap sebagai peran yang tidak memerlukan pendidikan tinggi.

Selain itu, jika dilihat kesempatan perempuan untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin juga masih menunjukkan kesenjangan, hal ini dapat dilihat dari data jumlah perempuan yang menjadi kepala sekolah baik di SD, SMP dan SMA masih menunjukkan kesenjangan yang cukup menonjol. Secara umum posisi kepala sekolah dijabat oleh guru laki-laki meskipun secara kuantitas guru laki-laki dan guru perempuan jumlahnya hampir sama di setiap jenjang pendidikan. Komposisi kepala sekolah di Provinsi Bali tahun 2006 seperti tergambar pada grafik 2.

Grafik: 2. Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA di Bali Menurut Jenis Kelamin Tahun 2006.



Sumber: Dinas Pendidikan, Statistik Persekolahan,

2006

Data pada Grafik 2 mengindikasikan bahwa sampai saat ini akses perempuan ke dunia kepemimpinan atau pengambil keputusan nampaknya masih terbatas karena nilai budaya yang berkembang menganggap urusan pemimpin identik dengan dunia publik yang nota bene menjadi dunianya laki-laki. Disamping itu stereotip gender atau pelebelan terhadap perempuan bahwa perempuan lemah, emosional dan perlu dilindungi masih menempel kuat di masyarakat.

Di bidang politik, kesenjangan gender masih nampak dengan jelas. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan perempuan dan laki-laki baik di bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Di ketiga bidang ini partisipasi perempuan persentasenya jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki. Di eksekutif misalnya, jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural di Pemda Bali tahun 2006 hanya 25,5%, selebihnya adalah laki-laki. Demikian juga pemimpin wilayah seperti kepala desa, lurah, camat dan bupati umumnya di dominasi oleh laki-laki. Sementara itu kesenjangan gender di legislatif nampak dari perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki anggota DPRD Bali yang hanya 4 : 55 orang. Di bidang yudikatif, contohnya adalah kecilnya keterlibatan perempuan di kepolisian, hakim dan jaksa (Arjani, 2006). Kondisi yang demikian ini tidak saja terjadi di Bali, tetapi juga terjadi di Indonesia dan di beberapa belahan dunia.

Realitas ini mendorong dunia internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2000 kembali melaksanakan konferensi tingkat tinggi untuk mewujudkan komitmen terkait dengan Millenium Development Goals (MDGs). Deklarasi MDGs ini telah menelorkan delapan komitmen yakni: 1, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; 2, memenuhi pendidikan dasar untuk semua; 3, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4, menurunkan angka kematian Balita; 5, meningkatkan kualitas kesehatan ibu melahirkan; 6, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lain; 7, menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan 8, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (Witoelar Erna; 2007). Dari 8 komitmen MDGs ini jelas terlihat bahwa secara global masalah kesetaraan gender merupakan masalah prioritas untuk ditangani. Deklarasi MDGs ini mengharapakan kepada setiap negara agar pada tahun 2015 semua komitmen yang sudah disepakati dalam konferensi dapat terwujud.

Oleh karena itu, Deklarasi MDGs ini merupakan tantangan bagi Indonesia untuk bisa mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender pada tahun 2015. Menindaklanjuti komitmen MDGs ini, pemerintah Indonesia telah mengambil satu kebijakan dan strategi untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan

dan keadilan gender (KKG) yakni melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) atau Gender Mainstreaming (GM). Strategi ini dilaksanakan dengan landasan hukum berupa Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Melalui strategi ini diharapkan semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Indonesia berperspektif gender sehingga hasil pembangunan dapat memberikan manfaat bagi laki-laki maupun perempuan.

Simpulan

Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan gender (KKG) bukanlah merupakan suatu yang mudah, tetapi memerlukan perjuangan yang ekstra keras karena hal ini berkaitan erat dengan perubahan nilai budaya atau konstruksi sosial budaya yang telah berurat akar di masyarakat. Namun demikian, karena semua nilai budaya yang ada di masyarakat adalah bentukan manusia, maka pada prinsipnya hal ini bisa diubah tetapi memerlukan proses yang panjang. Melalui upaya yang serius dan berkesinambungan maka secara lambat laun ideologi gender yang bersifat merugikan salah satu jenis kelamin akan dapat dikikis sehingga pada gilirannya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat Indonesia pada umumnya dan di Bali khususnya akan dapat terwujud. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender berarti masyarakat kita telah mampu memenuhi salah satu kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs) yang telah menjadi komitmen Internasional.

Daftar Pustaka

- Arjani (ed.), 2006. Statistik Gender dan Analisis Provinsi Bali, Denpasar, Biro BKPP, PSW UNUD
- Arjani, Dkk, 2007 . Profil Gender Bidang Pendidikan Provinsi Bali; Denpasar, PSW UNUD.
- Arivia, Gadis, 2003. Filsafat Berperspektif Feminis; Jakarta. Yayasan Jurnal Perempuan.
- Biro Pusat Statistik, 2006. Statistik Pendidikan; Denpasar. BPS.
- Budiman, Arief, 1985. Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat. Jakarta. PT Gramedia.

- Fakih, M, 1996. Menggeser Konsepsi Gender dan Transpormasi Sosial. Jogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Witoelar, Erna, 2007. Bahan Pelatihan Evaluasi Millenium Development Goals. Jakarta.
- KPP, UNFPA, BKKBN, 2005. Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender. Jakarta. KPP.
- Radjab, B, 2002. "Pendidikan Sekolah dan Perubahan Kedudukan Perempuan" Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesenjangan, Nomor 23. Halaman 19-23.
- Ni Luh Arjani, aktif sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Ketua Pusat Kajian Wanita Lembaga Penelitian sekaligus Pemimpin Redaksi Jurnal Studi Gender Srikandi Universitas Udayana. Alumni Sering terlibat dalam seminar dan diskusi mengenai gender berskala nasional dan internasional. email : pswunud@gmail.com